

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Teknologi telah berubah menjadi kebutuhan primer, karena kemampuannya dalam mempermudah berbagai aktivitas dan pekerjaan. Oleh karena itu, teknologi dianggap sebagai sumber daya yang sangat diperlukan. Penggunaan teknologi sebagai sumber daya ini mempermudah masyarakat dalam melakukan aktivitas. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam kehidupan modern adalah penggunaan internet. Internet berperan seperti buku yang membuka jendela dunia dan menjadi sebagai salah satu inovasi penting di era digital.

Inklusi keuangan telah menjadi tren sejak krisis di tahun 2008. Inklusi keuangan adalah segala upaya untuk menghilangkan berbagai hambatan yang menghalangi akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Inklusi keuangan diterapkan untuk mengurangi kondisi *unbanked* di dalam masyarakat. Tingkat inklusi keuangan dapat diukur dari persentase orang dewasa yang memanfaatkan produk dan layanan keuangan formal, seperti menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan menggunakan asuransi. Kepemilikan akun juga menjadi indikator dasar dari inklusi keuangan. Individu yang memiliki rekening bank lebih mampu menghindari kemiskinan, karena mereka dapat mengandalkan tabungan atau menerima dukungan keuangan dari keluarga atau

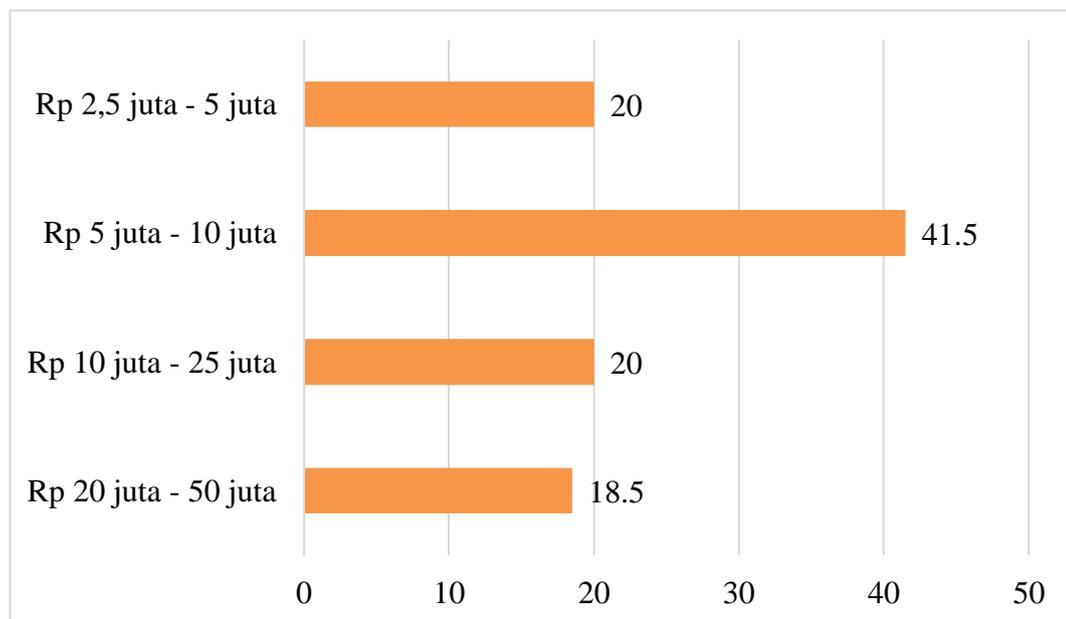
teman saat menghadapi keadaan darurat keuangan, seperti kehilangan pendapatan atau gagal panen.

Menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Keuangan (SNLIK) 2022 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, inklusi keuangan di Indonesia telah meningkat menjadi 85,10%. Artinya, pada tahun tersebut sekitar 85 dari 100 penduduk Indonesia sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal. Jika dirinci berdasarkan provinsi, tingkat inklusi keuangan di provinsi Jawa Timur sebesar 92,99%. Secara nasional, layanan keuangan tahun 2022 yang paling banyak diakses masyarakat adalah layanan perbankan dengan proporsi 74,03%. Sementara yang mengakses layanan keuangan perasuransian sebesar 16,63%, lembaga pembiayaan 16,13%, dan pegadaian 11,88%. Sebagian kecil yang mengakses layanan keuangan mikro 5,53%, dana pensiun 5,42%, pasar modal 5,19%, dan *financial technology* (*FinTech*) sebesar 2,56%.

Peran *FinTech* dalam meningkatkan inklusi keuangan juga terlihat dari beberapa karakteristik dasar *FinTech* yang dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, meningkatkan akses dan desentralisasi sistem keuangan, dimana kemajuan teknologi yang digunakan memungkinkan inklusi baik komunitas individu maupun UMKM yang tidak *bankable* untuk dapat berperan sebagai penyedia dan pengguna dana dalam sistem keuangan; kedua, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas sektor. Teknologi dapat menyediakan transparansi, penelusuran, pertanggungjawaban, dan pembagian informasi yang lebih baik kepada pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk saling

bekerja sama. Selain itu, teknologi juga mengurangi biaya melalui peningkatan efisiensi, kecepatan, dan otomatisasi. Karakteristik *FinTech* inilah yang memungkinkan akses layanan keuangan mencakup seluruh lapisan masyarakat (Marginingsih, 2021).

Grafik 1.1 Pengguna *FinTech* Berdasarkan Penghasilan



Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan penghasilan, pengguna layanan *FinTech* adalah individu yang sebanyak 41,5% berpenghasilan antara 5 juta hingga 10 juta. Kemudian, pendapatan sebesar 10 juta - 25 juta dan 2,5 juta - 5 juta dengan porsi 20%. Sisanya penghasilan sebesar 25 - 50 juta sebesar 18,5%. Namun, jika berdasarkan pasar utama layanan *FinTech*, semua provinsi di Jawa sekitar 5,3%, semua kota di Indonesia sebesar 6,7%, global 2,7%, dan lainnya 8%. Pemanfaatan *FinTech* di Jawa Timur sendiri tertinggal dibandingkan Jakarta dan Jawa Barat khususnya proses pengadaan barang dan jasa. *FinTech* di Jawa Timur hanya ada satu yang dimiliki oleh pengusaha lokal di Surabaya. Masih banyak UMKM yang belum

menggunakan *FinTech* sebagai penunjang usahanya. Salah satu penyebabnya adalah tingkat literasi keuangan yang masih rendah.

Di Indonesia, penggunaan *FinTech* online oleh UMKM telah mengalami peningkatan pesat dalam beberapa tahun terakhir. *FinTech* menyediakan berbagai layanan yang memudahkan transaksi, akses ke pinjaman, dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Semakin banyaknya UMKM yang mengadopsi teknologi ini, maka dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di Indonesia akan semakin terasa.

UMKM di provinsi Jawa Timur khususnya Kabupaten Sidoarjo juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Di wilayah ini, UMKM semakin mengandalkan *financial technology (FinTech)* untuk meningkatkan efisiensi dan akses layanan keuangan. Banyak pelaku usaha kecil di sektor fashion menggunakan aplikasi pembayaran digital seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk bertransaksi harian mereka. Selain itu, platform pinjaman *online* seperti KoinWorks dan Modalku telah membantu mereka mendapatkan modal usaha dengan lebih mudah dan cepat dibandingkan dengan metode tradisional.

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFTECH), sekitar 65% UMKM di Kabupaten Sidoarjo telah mengadopsi *FinTech* dalam operasional mereka, dengan 40% diantaranya berasal dari sektor fashion. Adopsi *FinTech* di kalangan UMKM Sidoarjo meningkat secara signifikan, terutama selama pandemi Covid-19. Laporan tersebut menyebutkan bahwa *FinTech* tidak hanya memudahkan transaksi keuangan saja, tetapi juga

membantu UMKM fashion untuk berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa *FinTech* sangat penting untuk pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM fashion di Sidoarjo.

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi yang cukup besar di bidang ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. UMKM juga merupakan sektor penopang perekonomian suatu negara yang memiliki peran penting terhadap perekonomian nasional. Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia adalah yang tertinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) menyebutkan bahwa di Indonesia saat ini terdapat sekitar 66 juta pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai hampir 99% dari keseluruhan unit usaha. Sektor ini memiliki kontribusi sebesar 61% atau senilai dengan 9.580 triliun rupiah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan 97% atau sekitar 117 juta pekerja terhadap penyerapan tenaga kerja di tingkat nasional.

Besarnya peran UMKM dalam struktur ekonomi dapat dibuktikan dengan semakin besarnya perhatian negara-negara maju terhadap UMKM di negara mereka. Hasil identifikasi dari Bank Indonesia (BI), ada empat tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM di Indonesia saat ini, diantaranya mempertahankan

UMKM dalam ekosistem digital, meningkatkan kapasitas, kualitas, dan produktivitas UMKM agar dapat berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan perdagangan global, memperluas akses keuangan, serta meningkatkan kesadaran lingkungan dalam proses produksinya. Menurut data dari Bank Indonesia (2022), kurang lebih 65 Juta UMKM di Indonesia, hanya 17,25% juta atau sekitar 26,5% UMKM yang telah terhubung pada ekosistem digital.

UMKM tersebar di berbagai provinsi di Indonesia salah satunya yaitu Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat UMKM di Indonesia dan menjadi sorotan Nasional karena keberhasilannya dalam membina koperasi dan UMKM, sehingga pondasi ekonominya cukup kuat ketika berada di titik *hyper* inflasi dan resesi yang terjadi beberapa waktu yang lalu (KOMINFO, 2023). Bertambahnya jumlah pelaku UMKM membuat pemerintah Kabupaten Sidoarjo berupaya meningkatkan keunggulan produk di Kabupaten Sidoarjo dan sekitarnya. Daya saing dapat ditingkatkan dengan cara mengembangkan teknologi dan sumber daya manusia, memperluas cakupan pemasaran, serta melakukan inovasi pada produk layanan.

Meskipun pertumbuhan UMKM terus meningkat, masih ada banyak hambatan yang dialami oleh pelaku UMKM. Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tetap meningkat. Perkembangan UMKM terhambat oleh beberapa masalah, seperti keterbatasan modal, pemanfaatan informasi dan teknologi yang kurang optimal, serta rendahnya literasi dalam

mengelola usaha mereka. Menurut Data Koperasi UMKM tahun 2023, jumlah usaha mikro di Kabupaten Sidoarjo sebesar 176.425 usaha mikro.

UMKM di Kabupaten Sidoarjo memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian lokal. Sebagai salah satu daerah dengan pertumbuhan UMKM yang pesat, Sidoarjo menyumbang secara substansial terhadap ekonomi Jawa Timur. Pada tahun 2021, sektor UMKM dan koperasi di Jawa Timur secara keseluruhan menyumbang sebesar 58,78 persen terhadap produk domestik regional bruto (PDRB). Hal ini mencerminkan kontribusi yang kuat dari sektor UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai pusat UMKM yang aktif, dengan berbagai inisiatif penguatan dan pengembangan yang telah dilakukan. Misalnya, implementasi program KURDA (Kredit Usaha Rakyat Daerah) di Sidoarjo yang telah berhasil memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku UMKM, termasuk di sektor fashion yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing dan menciptakan lapangan kerja. Pentingnya literasi keuangan, dukungan dari *FinTech*, dan peran modal sosial dalam ekosistem UMKM di Sidoarjo menjadi faktor kunci dalam memahami dinamika pertumbuhan sektor ini. Literasi keuangan yang tinggi memungkinkan para pelaku usaha untuk lebih efektif mengelola keuangan mereka dan memanfaatkan layanan keuangan secara optimal. Sementara itu, adopsi *financial technology (FinTech)* memberikan solusi inovatif dalam pembiayaan dan pemasaran, yang memperluas aksesibilitas bagi UMKM di Sidoarjo. Di sisi lain, modal sosial memperkuat jaringan kolaborasi antar pelaku

usaha, meningkatkan akses terhadap sumber daya dan informasi, serta memperkuat daya saing usaha mikro dan kecil di daerah ini.

Berdasarkan laporan Asosiasi *FinTech* Indonesia (AFTECH), target pasar perusahaan *FinTech* di dominasi oleh UMKM. Sepanjang 2021 lalu, sebanyak 62% penyelenggara *FinTech* melayani UMKM. Bahkan, 42% perusahaan *FinTech* menyebutkan nilai transaksi dari UMKM mencapai lebih dari Rp 80 miliar. Menurut OJK, penggunaan layanan *FinTech* yang cukup banyak berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan menengah menjadi indikasi bahwa layanan *FinTech* menjadi alternatif layanan jasa bagi kelompok masyarakat *unbaked*.

Untuk meningkatkan kesejahteraan UMKM, diperlukan manajemen keuangan yang baik. Dengan mengelola keuangan yang baik, tanggung jawab terhadap keuangan sangat diperlukan agar proses manajemen keuangan dilakukan dengan cara positif. Permasalahan pada kemampuan pengelolaan keuangan tidak hanya terkait anggaran investasi saja. Permasalahan pengelolaan keuangan bisa terjadi karena rendahnya pengetahuan mengenai kredit. Hal ini juga dialami oleh UMKM di Kabupaten Sidoarjo terkait permodalan. Pelaku UMKM tidak menggunakan layanan perbankan untuk permodalannya karena minim pengetahuan tentang prosedur pinjaman, sehingga mereka menganggap bahwa prosedur pinjaman relatif sulit. Hal ini terjadi pada pelaku UMKM fashion di Kecamatan Gedangan. Menurut Data Koperasi dan Usaha Mikro, jumlah usaha mikro bidang fashion di Kecamatan Gedangan sebanyak 73 usaha. UMKM fashion memiliki dukungan yang cukup baik di ranah publikasi, dimana dapat dilihat dari banyaknya

postingan pada media sosial. Dari dulu hingga sekarang fashion selalu bertumbuh dan berkembang dinamis serta memiliki potensi yang besar.

Theory Planned of Behavior (TPB) yang dikemukakan oleh Ajzen (1991) sering digunakan dalam berbagai penelitian, karena kemampuannya untuk memprediksi dan menjelaskan maksud dibalik perilaku seseorang, serta menganalisis model perilaku. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku seseorang muncul karena adanya niat untuk bertindak. TPB difokuskan pada perilaku spesifik individu dan dapat diterapkan pada berbagai perilaku secara umum. Niat seseorang untuk bertindak diprediksi oleh tiga faktor utama: sikap terhadap perilaku (*attitude*), norma subjektif (*subjective norm*), dan persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*). Dengan demikian, TPB menyatakan bahwa niat individu untuk bertindak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Tiga variabel utama yang mempengaruhi niat untuk berperilaku adalah sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan peran literasi keuangan dan *financial technology* dengan *social capital* sebagai mediator pada UMKM fashion di Kabupaten Sidoarjo.

Beberapa penelitian menegaskan bahwa literasi keuangan berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan. Dalam literatur ilmiah, kesepakatan ini menyoroti pentingnya pemahaman konsep keuangan dan keterampilan dalam mengelola uang untuk memfasilitasi akses yang lebih baik ke produk dan layanan keuangan serta partisipasi yang lebih aktif dalam sistem keuangan. Pencapaian

inklusi keuangan yang stabil merupakan hasil dari berbagai faktor, termasuk kemampuan literasi keuangan yang baik. Literasi keuangan memungkinkan individu untuk memahami konsep-konsep keuangan, mengelola risiko, dan membuat keputusan keuangan yang cerdas. Sehingga, meningkatkan literasi keuangan adalah hal yang harus dilakukan bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, literasi keuangan merupakan salah satu faktor kesuksesan pelaku usaha di era digital. Literasi keuangan juga termasuk pada faktor non finansial kegagalan pelaku usaha UMKM. Astuti & Khusnul (2022), mengatakan literasi keuangan pelaku usaha yang tinggi akan lebih memudahkan pelaku usaha dalam mengelola usahanya, seperti pengelolaan anggaran, perencanaan simpan dana usaha, serta pengetahuan dasar keuangan dalam menggapai tujuan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evelyn Angelina & Njo Anastasia (2022), membuktikan bahwa literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap *financial inclusion*. Didukung hasil penelitian oleh yang Antony et al (2021), menunjukkan bahwa literasi keuangan berfungsi sebagai alat untuk memberikan seseorang akses lebih luas ke layanan keuangan dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penggunaan sumber daya keuangan serta pentingnya dalam mewujudkan inklusi keuangan. Namun, ini berbeda dari penelitian Natalia et al (2020), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari literasi keuangan secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

Antony et al. (2021), menunjukkan bahwa literasi keuangan berfungsi sebagai alat untuk memberikan seseorang akses lebih luas ke layanan keuangan dan membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai penggunaan sumber daya

keuangan serta pentingnya dalam mewujudkan inklusi keuangan. Namun, ini berbeda dari penelitian Natalia et al. (2020), menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari literasi keuangan secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan.

Secara umum, *FinTech* adalah penggabungan dari sistem keuangan dan teknologi yang menghasilkan sesuatu yang baru (Pramessti & Yuliyanti, 2021). Pengaruh *financial technology (FinTech)* terhadap inklusi keuangan didasarkan pada teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Menurut Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh keyakinan terhadap informasi yang diperoleh. Jika sumber daya dan peluang yang diperlukan untuk melakukan suatu perilaku, maka individu tersebut berhasil melakukannya. Motivasi atau niat, serta kontrol perilaku yang dimiliki individu juga mempengaruhi keberhasilan tersebut. Dalam konteks ini, *FinTech* termasuk dalam kategori faktor informasi. Ketika seseorang mengetahui adanya *FinTech*, informasi tersebut dapat mendorong individu untuk mengakses atau menggunakan produk dan layanan yang ditawarkan oleh *FinTech* (Pramessti & Yuliyanti, 2021).

Penelitian oleh (Bakhtiar dkk., 2022; Lastari dkk., 2023; Rahmadanti et al., 2023) menyatakan bahwa *FinTech* memiliki dampak yang cukup besar terhadap keuangan inklusi dengan memfasilitasi akses produk keuangan bagi pelaku usaha. Namun ini berbeda dari penelitian AN Sari & Kautsar (2020), yang mengungkapkan bahwa *FinTech* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan karena masyarakat belum aktif menggunakan *FinTech* untuk mengakses produk dan layanan lain yang tidak mendorong inklusi keuangan.

Selain itu, terdapat aspek lain yang mampu meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia, yaitu modal sosial. Karena manusia pada dasarnya merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Yoga, 2020). Modal sosial melibatkan solidaritas, kepercayaan (*trust*), dan fasilitas yang diberikan dalam menjalankan bisnis, serta mencakup hubungan sosial dengan keluarga, teman, dan rekan kerja. Modal sosial berfungsi sebagai perekat yang menyatukan masyarakat dan sebagai sumber informasi yang dapat menyelesaikan masalah terkait dengan layanan keuangan.

Pengaruh *financial technology* (*FinTech*) terhadap inklusi keuangan didasarkan pada teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*). Modal sosial dapat mempengaruhi niat dan perilaku individu dalam menggunakan layanan keuangan. Menurut *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), perilaku individu dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Modal sosial dapat memperkuat norma subjektif dan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, modal sosial dapat berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Penelitian oleh Intishar A. (2020), membuktikan bahwa modal sosial memiliki hubungan yang signifikan terhadap inklusi keuangan. Hal ini berbeda dengan hasil yang diteliti oleh Irman et al. (2022), bahwa modal sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan pada UKM sektor perdagangan.

Berdasarkan pemaparan fenomena gap, *research gap*, dan dukungan teori dari beberapa ahli, hasil penelitian terdahulu dan kondisi inklusi keuangan pelaku UMKM Kabupaten Sidoarjo menjadi latar belakang penelitian ini, peneliti

bermaksud untuk melakukan penelitian yang mengarah pada fenomena inklusi keuangan yang dirasa perlu digali lebih lanjut akan faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology (FinTech)* terhadap Inklusi Keuangan dengan Modal Sosial sebagai Mediator pada UMKM Fashion di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan?
2. Apakah *financial technology (FinTech)* berpengaruh terhadap inklusi keuangan?
3. Apakah modal sosial memediasi antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan?
4. Apakah modal sosial memediasi antara *financial technology (FinTech)* dengan inklusi keuangan?
5. Apakah modal sosial berpengaruh terhadap inklusi keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap inklusi keuangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh *financial technology (FinTech)* terhadap inklusi keuangan.
3. Untuk menganalisis apakah modal sosial memediasi antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan.
4. Untuk menganalisis apakah modal sosial memediasi antara *financial technology (FinTech)* dengan inklusi keuangan.

5. Untuk menganalisis pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan referensi kepada peneliti berikutnya terhadap masalah yang sama. mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan sampai sejauh mana teori-teori yang sudah ditetapkan, sehingga hal-hal yang masih dirasa kurang dapat diperbaiki.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi, baik berupa masukan maupun pertimbangan yang bermanfaat khususnya bagi UMKM agar dapat meningkatkan inklusi keuangan untuk pertumbuhan dan keberlangsungan usahanya.